

## Mahakam, Reputasi bagi Pertamina

Pada Jumat (27/2/2015) Pertamina secara resmi mengajukan proposal pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis pengelolaannya Maret 2017 mendatang. Pada bulan Maret ini harus putus, karena berdasarkan aturannya mengamanatkan paling lama 2 tahun sebelum masa kontrak pengelolaan habis, harus diputuskan negara siapa pengelola selanjutnya. Masalahnya siapa yang akan melanjutkan pengelolaan blok yang mengandung banyak migas itu.

Akhir-akhir ini dorongan agar Pertamina yang ditunjuk sebagai “pemilik” sangatlah besar, sekalipun juga ada keraguan akan kemampuan oleh beberapa pihak lainnya. Katanya, jangan sampai produksi cepat melorot seperti pada pengalaman mengelola Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru Block (Blok CPP) dengan luas sebesar 9.135,06 kilometer persegi. Blok CPP terletak di Propinsi Riau – Sumatera. CPP itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Hingga pertengahan tahun lalu produksi minyak mentah konsorsium bersama itu menurun 8% per tahunnya.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Pertamina, kecuali harus berbuat sesuatu yang jelas, semacam **value creation** untuk menjawab keraguan masyarakat itu dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurut penelitian World Bank (2011), Perusahaan migas nasional banyak Negara (NOCs) saat ini sudah menguasai 90% cadangan migas dunia dan ini berbeda terbalik dengan situasi pada tahun 1970 an yang hanya menguasai 10% saja. Selebihnya 90 % dikuasai oleh perusahaan minyak raksasa dunia seperti Shell, Mobil Oil, Total dan lainnya. Apa kuncinya? Tidak lain adalah karena kemampuan NOCs dalam mengembangkan dan menerapkan *value creation* yang ada disepanjang mata rantai industri migas nasional nya dalam kurun waktu panjang dan ini secara fantastis menurut World Bank tercermin pada indikator *operational, financial and national mission performance*.

Lalu kapan Pertamina bisa mengembangkan dan menerapkan *value creation* itu kalau pengalamannya hanya berkutat pada lapangan tua dan kecil saja, kecuali jika seperti di negara belahan dunia lain, memberi kesempatan pada NOCs untuk mengelola lapangan skala besar dengan segala kerumitannya.

Kesempatan itu, ya sekarang ini di blok Mahakam. Kenapa? Blok Mahakam itu diperkirakan masih menyisakan cadangan P2 minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan P2 gas sebanyak 3,8 TCF. Cadangan itu masih potensial, dan pengembangan lapangan akan membutuhkan teknologi dan modal besar. Tapi itu tidak apa, karena Pertamina sebelumnya sudah berhasil mengambil alih dan mengelola dengan sukses Blok PHE WMO yang ada di Jawa Timur.

Pengambil alihan blok ini dari kontraktor asing memberikan nilai plus bagi Pertamina, bukan hanya dalam bentuk finansial, tapi juga hal lain yang bersifat *intangible* seperti tambahan pengalaman baru dan meningkatnya reputasi di dunia migas global.

Yang harus dilakukan saat ini, bagaimana Pertamina memberikan keyakinan kepada sejumlah pihak, terutama yang selama ini memberikan kesan miring atau keraguannya terhadap kemampuan perusahaan plat merah itu. Ini menjadi bagian penting, karena bila ada kebulatan tekad secara bersama, maka keyakinan itu akan muncul. Bila keyakinan muncul, pada akhirnya keberhasilan yang kita raih. Juga demikian dengan Pertamina yang dari jauh hari sudah menyiapkan diri untuk menerima pengelolaan Blok Mahakam ini dari negara.

Dari dapur redaksi, kami mendukung sepenuhnya, langkah-langkah Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Apalagi pemerintah sudah memberikan sinyal bahwasanya pengelolaan itu akan diberikan kepada Pertamina sebagai operator utama. Selanjutnya sebagaimana sudah umum berlaku di wilayah lain, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendapatkan jatah 10% saham Blok

Mahakam pasca berakhirnya kontrak Total EP Indonesia di Blok Mahakam pada tahun 2017 mendatang.

Pengalaman selama ini memperlihatkan Pemerintah Daerah belum mempunyai sumber pendanaan yang cukup, sehingga pemberian saham ke daerah pada setiap kali mendapatkan saham pengelolaan sumber daya energi dan mineral di wilayahnya, selalu melibatkan pihak swasta. Disini tentu banyak masalah. Karena itu, Pemerintah Pusat dan Daerah masih punya pekerjaan rumah yang besar tentang pengaturan pendanaan saham daerah itu, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Pengelolaan Blok Mahakam adalah langkah besar bagi Pertamina, langkah besar juga bagi Pemerintah dalam membangun kedaulatan energi. Karena itulah, semua soal kendala hambatan harus dibereskan dengan tegas, sehingga tongkat estafet pengambilalihan Blok Mahakam itu berjalan mulus. (\*)

Maret 2015

DR. Ibrahim Hasyim SE. MM.